

KONSEP, PRAKTIK, DAN KONTEKSTUALISASI MANUSIA POLITIK DAN RUANG PUBLIK HANNAH ARENDT

I Gusti Agung Ayu Brenda Yanti¹, Wahyu Budi Nugroho², Gede Kamajaya³

¹²³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: brendayanti28@gmail.com¹, wahyubudinug@yahoo.com², kamajaya_1965@yahoo.com³

ABSTRACT

*In analyzing Hannah Arendt's thoughts about political man, there are main concepts that first have to be understood, i.e. *vita activa* or fundamental human activities. From the concept, two characters can be concluded: first, political man is man who uses their thoughts actively, and the second character from political man is freedom. Political man is a free human. To get the identity, political human needs sphere called the public realm. Arendt defines public realm to be two definitions: the first definition is as public appearance, a place where the individual shows themselves in front of other people and the second definition is common world which means the whole condition resulting from man's creation that needs to be lived together.*

Keyword: *Political Man, Vita Activa, Public Realm, Hannah Arendt.*

1. PENDAHULUAN

Manusia dalam hidupnya senantiasa bersama dan bergantung pada manusia lainnya. Tindakan ini dapat dikatakan sebagai mekanisme bertahan hidup manusia yang terbentuk secara naluriah atas kesadarannya tentang kepentingan dan kebutuhan. Dalam upaya memenuhi segala kebutuhannya, manusia bergantung pada manusia lain. Kepentingan menjadi alasan manusia untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya, sama halnya dengan kebutuhan. Baik kepentingan dan kebutuhan inilah yang akhirnya menuntut manusia untuk hidup bersama atau berkelompok. Adanya tujuan bersama ini menciptakan bentuk interaksi sosial yang sifatnya asosiatif.

Selanjutnya terminus 'manusia' ini pun berkembang menjadi masyarakat. Hal ini terjadi ketika kerjasama tadi telah berubah

menjadi cara hidup bersama, dan demi kehidupan bersama yang lebih teratur, dibentuklah suatu 'kumpulan' dengan seperangkat tata cara hidup bersama beserta struktur pengaturannya. Dengan menempati satu wilayah tertentu, maka kelompok manusia ini akan berubah statusnya tidak hanya menjadi sekedar gerombolan namun berupa negara dan warga negara.

Aristoteles menggunakan istilah *zoon politicon* sebagai pengandaian manusia ialah "binatang politik" dan negara merupakan komunitas politis yang mana keduanya terbentuk secara alamiah sebagai penjabaran fenomena di atas. Dalam negara atau *polis*, manusia sebagai definisi subjek secara parsial menemukan identitas dan eksistensinya sebagai subjek politikal yang berpijak pada keyakinannya masing-masing.

Hal ini merupakan akar di mana manusia menjadi "individu politik".

Meyinggung tentang manusia politik, dalam antropologi politik yang dijelaskan oleh seorang filsuf Jerman, Hannah Arendt, dikatakan bahwa manusia adalah makhluk politik sebagai hasil konstruksi dari tindakan bebas dan sadarnya, jadi ia bersifat kultural, bukan terbentuk secara alamiah. Manusia sebagai "yang sosial" ditolak oleh Arendt karena dianggap semata-mata manusia hanya diorganisasikan dalam hubungan alamiah untuk sekedar memenuhi kebutuhan diri. Arendt sendiri sangat membedakan "yang politis", "yang sosial", dan "yang ekonomis", baginya yang manusiawi hanyalah "manusia politis" (Terre, 2011: 3).

Lebih jauh mengenai tindakan yang dimaksud oleh Arendt tersebut, ia jabarkan dalam konsep terkenal yaitu *vita activa*. *Vita activa* digunakannya untuk mengkritik kehidupan modern yang mana salah satunya mengenyampingkan aktivitas kontemplasi manusia dan hanya mengedepankan hal-hal praktis. Konsep ini membagi tiga aktivitas manusia, yaitu; aktivitas kerja, karya, dan tindakan. Bagi Arendt aktivitas manusia yang paling sempurna adalah tindakan, karena dalam tindakan manusia telah memahami kebebasan dan memahami pluralitas (Indah, 2015: 295).

Untuk mewujudkan dirinya sebagai seorang manusia politik, manusia membutuhkan ruang publik sebagai area validasi identitasnya. Arendt menerjemahkan ruang publik melalui dua definisi yakni sebagai "ruang penampakan" dan sebagai "dunia bersama". Keduanya berperan bagi

seorang manusia politik baik sebagai arena penampakan dirinya dan juga sebagai tempat dirinya hidup bersama manusia lainnya. Pada penelitian ini akan dijabarkan konsep ideal Manusia Politik Hannah Arendt melalui penjabaran filsafat tindakannya.

2. KAJIAN PUSTAKA

Salah satu kajian yang secara eksplisit membahas mengenai manusia politik Hannah Arendt adalah milik Edi Riyadi Terre (2013) *Manusia Politik, Sebuah Rekonstruksi Interpretasi Hannah Arendt terhadap Tindakan Politik Manusia* dalam buku antologi berjudul *Manusia, Laki-Laki, Perempuan, Pengantar ke Pemikiran Hannah Arendt, Seyla Benhabib, Judith Butler, Ziba Mir-Hosseini*. Dalam tulisan ini, peneliti memadatkan pemikiran Hannah Arendt sekaligus memberikan kritik dan penajaman tentang pemikiran yang akhirnya membangun konsep politik dan manusia politik. Karya ini bertujuan untuk mengungkapkan asumsi manusia politik. Arendtian yang menjadi basis konstruksi pemikiran politiknya atau yang memungkinkan adanya politik.

Kajian serupa yang menjabarkan mengenai pemikiran Hannah Arendt yakni jurnal skripsi milik Paramitha Wardhani (2014) Jurusan Filsafat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia yang berjudul *Enlarged Thought: Berpikir Politis menurut Hannah Arendt*. Karya ini menjelaskan bagaimana kehancuran ruang publik dan 'absennya pikiran' membuat tindakan politis menjadi apolitis. Contoh dari *thoughtlessness* atau absennya pikiran ini terjadi pada kasus Adolf

Eichmann, di mana ia sebagai eksekutor Nazi bertindak hanya atas dasar ideologi yang berlaku pada saat itu, bukan berdasarkan hati nurani atau pikiran rasionalnya. Sedangkan bagi Arendt, berpikir merupakan poin penting dalam politik karena kejahatan terjadi bukan karena miskinnya moralitas tapi karena absennya pikiran. Lebih jauh lagi, berpikir merupakan tindakan ketika individu menarik diri dari “dunia bersama” dan kembali berinteraksi dengan dirinya, hingga pada akhirnya akan dimanifestasikan melalui tindakan dan ucapan.

Penelitian lain yang turut menggunakan Hannah Arendt sebagai tokoh kajiannya ialah milik Astrid Veranita Indah (2015) berjudul *Jatidiri Manusia Berdasarkan Filsafat Tindakan Hannah Arendt Perspektif Filsafat Manusia: Relevansi dengan Pelanggaran HAM Tahun 1965-1966 Di Indonesia* dalam Jurnal Filsafat UGM. Kajian ini banyak membahas mengenai filsafat tindakan Arendt yang dikutip dari konsep *vita activa* dan elaborasinya dengan konsep jati diri yang diungkapkan oleh Hardono Hadi yang berjudul *A Whiteheadian Reflection on The Human Person*. Filsafat tindakan ini salah satunya berperan dalam menganalisis kemampuan manusia mengampuni, berjanji, serta membangun persahabatan terutama dalam kasus yang disoroti Arendt sendiri yakni pengadilan Adolf Eichmann. Hal ini menginspirasi Astrid Veranita Indah untuk menjawab persoalan mengenai pelanggaran HAM di Indonesia yang terjadi pada tahun 1965-1966.

Setelah menilik penelitian oleh Edi Riyadi Terre (2013), Paramita Wardhani

(2014) dan Astrid Veranita Indah (2015) tersebut, ketiganya sama-sama mengupas pemikiran Hannah Arendt, pun ketiganya setuju terhadap konsep dasar “dunia bersama” yang diusung oleh Arendt. Sedangkan yang menjadi pembeda adalah pada penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana aktivitas berpikir yang dimanifestasikan dalam bentuk tindakan menciptakan subjek politik. Selain itu penulis juga akan menjelaskan bagaimana praktik serta kontemplasinya, sehingga nantinya ditemui gambaran praktik dari teori maupun konsep manusia politik.

3. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*. Metode kualitatif yang digunakan sifatnya deskriptif-eksploratif di mana penulis berusaha memberikan definisi atau penjelasan mengenai konsep atau pola dari objek penelitian. Sedangkan eksploratif sendiri berarti peneliti bertujuan untuk menemukan suatu pengetahuan baru mengenai atau pematangan suatu konsep dari objek yang diteliti yang sebelumnya masih belum banyak dikaji dengan jangkauan yang lebih luas. Penelitian ini bersifat kualitatif karena didasarkan pada metode pengumpulan data yang menekankan pada kedalaman informasi serta pemahaman secara mendalam terhadap permasalahan yang sedang dikaji.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Adapun data-data dikumpulkan

melalui studi penelaahan terhadap buku-buku ataupun literatur-literatur yang relevan dengan objek penelitian berupa karya-karya literatur terdahulu baik dari Hannah Arendt langsung atau dari penelitian sebelumnya yang secara eksplisit maupun implisit mengkaji tema serupa.

Setelah tahapan tersebut dilakukan, maka tahapan selanjutnya adalah interpretasi data. Mengingat penelitian yang dilakukan bersifat historis faktual sesuai dengan penjelasan sebelumnya, maka digunakanlah metode hermeneutika dalam tahap metode interpretasi data dengan unsur-unsur metodis sebagai berikut (Harahap, 2011: 49-53): 1) Metode interpretasi, 2) Metode induksi, 3) Metode koherensi intern, 4) Metode kesinambungan historis, dan 5) Metode deskripsi. Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. Hal tersebut dilakukan setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul, dinilai, dan ditafsirkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. BIOGRAFI HANNAH ARENDT

Hannah Arendt merupakan nama yang tidak bisa disingkirkan dari jajaran filsuf-filsuf Eropa dengan pemikiran yang kontroversial dalam menerjemahkan sejarah. Seorang ahli teori politik dan murid kesayangan dari filsuf eksistensialisme kenamaan, Martin Heidegger. Ia juga seorang pengasingan yang tak kenal lelah menghadapi kengeriang-kengerian terburuk dari tirani Eropa. Hidupnya diperkaya oleh pemikiran inovatif dan dimuliakan oleh

persahabatan dan cinta. Karya-karyanya banyak mendulang perhatian khalayak umum seperti *The Human Condition*, *The Origin of Totalitarianism*, dan *Eichmann in Jerusalem: A Report on The Banality of Evil* yang membuatnya terpaksa melepas 'keyahudiannya'.

4.2. KONSEP DAN PRAKTIK IDEAL MANUSIA POLITIK HANNAH ARENDT

4.2.1. VITA ACTIVA DAN VITA CONTEMPLATIVA

Inti teori dari filsafat Hannah Arendt sendiri adalah "keberadaan manusia". Menurut Arendt, kegiatan dasar manusia dibagi dalam dunia; (1) Dalam Teori (*bios theoretikos*) melalui *vita contemplativa* dan, (2) Dalam Praktik (*bios politikos*) melalui *vita activa*. *Vita contemplativa* sendiri ditelusuri oleh Arendt melalui gagasan Yunani mengenai *bios theoretikos* yang dianggap menjadi "cita-cita dari kehidupan kontemplasi" atau *theoria*.

Adapun tiga jenis aktivitas kontemplasi manusia tersebut adalah: *pertama*, berpikir (*thinking*) yang merupakan aktifitas refleksi manusia ke dalam diri sebelum ia menjamah keluar dirinya, baik itu mengenai tindakan, ucapan, ataupun tentang orang lain (Arendt, 1978:5-6). *Kedua*, berkehendak (*willing*), merupakan bentuk percakapan sunyi dengan diri sendiri. Kehendak menjadi sarana manusia untuk membebaskan diri dari keabsolutan dunia dan belajar untuk berdiri di kakinya sendiri (Pandor, 2013: 11-12). *Ketiga*, menilai (*judging*) yang diterjemahkan sebagai

kemampuan menentukan hal-hal tertentu dengan melibatkan semua orang dan bertujuan kepada ruang publik (Arendt, 1978: 193).

Sedangkan *vita activa* yang merupakan otokritik Arendt terhadap dunia kontemplasi. Filsafat barat selama ini dianggap terlalu menyibukkan diri dengan esensi dan keabadian, mengutamakan teori di atas praktik.

Tiga modal dalam kehidupan aktif manusia tersebut adalah: *pertama*, kerja (*labor*), aktivitas kerja didasari atas kebutuhan biologis dan keinginan bertahan hidup. Aktivitas kerja tidak mengandaikan keberadaan manusia lainnya, di sini manusia mengaktualisasikan dirinya sebagai seorang *animal laborans* (binatang pekerja). *Kedua*, karya (*work*), dalam karya manusia mengaktualisasikan dirinya sebagai seorang *homo faber* di mana ia menciptakan objek-objek untuk mempermudah kehidupannya. Dasar logika dalam setiap aktivitasnya sangat instrumentalis. *Ketiga*, tindakan (*action*) yang bagi Arendt merupakan bentuk aktivitas tertinggi dalam kehidupan manusia karena di dalamnya mengandaikan kebebasan dan pluralitas. Ia turut melibatkan aktivitas berpikir sebagai fase pra-tindakannya (Arendt, 1958: 7).

Meski demikian tindakan manusia tetap memiliki kelemahan, yakni: 1) *Unpredictable*, tindakan manusia tidak bisa diramalkan sepenuhnya baik hasil maupun konsekuensinya. 2) *Irreversible*, kelemahan tindakan manusia yang kedua adalah tidak dapat bisa dikembalikan pada titik nol. Untuk mengatasi kedua hal tersebut maka

diadakanlah sebuah janji dan pengampunan. Keduanya memberikan kesempatan bagi manusia untuk kembali membuka awal yang baru (Haryatmoko, 2014: 96-99).

4.2.2. MANUSIA POLITIK HANNAH ARENDT

Manusia tanpa tindakan dan wacana tetaplah memiliki esensi dan eksistensi, juga hadir di dunia sebagai manusia pada umumnya. Namun yang membedakannya dari mereka yang membicarakan kebenaran, adalah keaktifannya sebagai manusia berfikir dan mengambil tindakan yang secara bebas dan sadar atas hasil pemikirannya dan bertujuan untuk memperpanjang kehidupan bersama di dunia bersama. Maka dari itu, karakteristik manusia politik Arendt yang *pertama* adalah segala tindakannya haruslah didasari oleh keaktifannya menggunakan pikirannya.

Meski pada dasarnya manusia telah diberikan kemampuan berpikir, namun tidak semuanya menggunakan kecerdasan tersebut untuk berpikir secara menyeluruh, berpikir secara sistematis. Ketidakmampuan berpikir ini dapat dikatakan pula sebagai keabsenan dari fakultas pikiran, hal ini sama sekali berbeda dengan kebodohan. Ketidakmampuan berpikir atau keengganan berpikir ini merupakan kondisi di mana individu tak mampu mengambil jarak dari hegemoni nilai (baik yang dianut oleh masyarakatnya atau yang diturunkan oleh penguasa) dan tidak mampu mengembangkan pikirannya untuk

menemukan perspektif lain sebagai pertimbangan tindakannya.

Hal ini menyebabkan individu mengonsumsi begitu saja nilai yang diterimanya, sehingga seringkali ia tidak sadar bahwa tindakannya bisa saja merupakan suatu kejahatan yang brutal. Fenomena ini digambarkan tepat oleh Arendt pada kasus Adolf Eichmann di mana tindakannya membantai puluhan ribu Yahudi pada rezim Nazi adalah kejahatan yang banal. Kejahatan yang dilakukan oleh Eichmann bukanlah berasal dari rasa benci, dendam, atau bahkan kebodohnya, tetapi semata-mata karena ketidakmampuannya untuk berpikir (Arendt, 2012: 449).

Banalitas kejahatan ini tidak semata ketika suatu kejatan telah dianggap dangkal. Bagi Arendt, “banal” didefinisikan bahwa kejahatan tidak hanya sekadar terjadi karena kelaziman dalam diri setiap orang, melainkan kejahatan dapat menjadi banal bahkan ketika itu bukanlah hal yang dangkal bagi setiap orang. Maka dari itu, banalitas kejahatan tak lantas terjadi hanya karena kejahatan tersebut telah menjadi dangkal atau lazim bagi setiap orang. Kelaziman adalah apa yang sering atau lazim terjadi, sedangkan sesuatu dapat menjadi banal bahkan ketika hal tersebut bukanlah hal yang ‘lazim’ (Jena, 2019: 157-158).

Hal penting lain yang membentuk diri seorang manusia politik adalah kebebasan. Bebas berarti secara internal maupun eksternal, di mana secara internal diri manusia tersebut ia tidak terbelenggu oleh ideologi atau aturan-aturan simbolik dari lingkungannya dalam berpikir maupun

bertindak, juga tindakannya tidak di dasari atas hasrat-hasrat privat semata yang akan membuat tindakannya menjadi apolitis. Sedangkan secara eksternal, tindakan dan wacananya tidak baik berada dalam represi pihak manapun. Adanya represi dari pemerintah atau rezim dalam kegiatan berwarga negara telah menunjukkan matinya kebebasan publik dan menjadi indikasi munculnya praktik-praktik penjajahan hak seperti tirani. Pentingnya kebebasan dalam diri maupun di luar diri individu karakter *kedua* dari seorang manusia politik ialah manusia yang bebas.

Dalam *on Revolution*, Hannah Arendt membedakan dua macam kebebasan, yaitu kebebasan politik (*political freedom*) dan kebebasan personal (*personal freedom*). Meskipun dua bentuk kebebasan Arendt ini kerap kali disandingkan dengan dua jenis kebebasan yang dijelaskan oleh Isaiah Berlin, penjelasan Arendt mengenai kebebasan jauh melampaui dari sekedar sifat positif dan negatif. Kebebasan yang dianggap positif dalam pengertian Arendt adalah kebebasan politik atau “bebas-untuk” (*freedom to*), di mana seorang individu dapat melakukan apapun dan menjadi apapun berdasarkan otonomi seseorang. Sedangkan yang diasosiasikan dengan kebebasan negatif adalah kebebasan personal atau “bebas-dari” (*freedom from*), di mana individu bebas dari penghalang pemenuhan terhadap diri sendiri. *Freedom from* yang mengandaikan kebebasan manusia dari tekanan atau halangan hanya memahami bagaimana manusia mendapatkan keamanan diri dan keamanan sosial. Maka dari itu hal ini

menjadikan kebebasan sama dengan keamanan, dan hanya dapat ditegakkan melalui aturan-aturan rezim atau negara sebagaimana Hobbes mengartikan Leviathan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan yang dimaksudkan oleh Arendt adalah kebebasan politik, dan kebebasan diluar kebebasan politik adalah tidak ada (Terre, 2013: 15).

Kebebasan yang ditekankan Arendt bukanlah berada pada ranah privat atau ranah batin manusia, di mana ia dapat melarikan diri sesuka hati dari tekanan dunia, juga bukan *liberum arbitrium* yang memberikan kehendak bebas memilih di antara alternatif. Kebebasan bagi seorang manusia politik hanya bisa dan ada di depan umum, yang mana adalah realitas dunia yang nyata, sesuatu yang diciptakan oleh manusia dan untuk dihidupi oleh manusia itu sendiri. Kebebasan membutuhkan ruang yang

4.3. KONTEKSTUALISASI MANUSIA POLITIK HANNAH ARENDT DI ERA KONTEMPORER

Penggambaran konsep manusia politik menurut Hannah Arendt salah satunya dapat ditemui pada dua orang tokoh politik di Indonesia, yakni Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta. Ahok terkenal sebagai seorang pemimpin yang tegas terutama mengenai anggaran daerah. Ahok dianggap membersihkan citra pemimpin daerah yang korup. Ia sebagai seorang pemimpin, mampu lepas dari tekanan hasrat privatnya untuk memperkaya diri dengan menggunakan hak dan kekuasaannya. Sedangkan Winasa, ia dikenal sebagai bupati dengan penuh inovasi

memungkinkan mereka untuk bisa berkumpul bersama, sebuah ruang publik buatan manusia seperti pasar, agora, atau bahkan polis di mana kebebasan muncul dan menjadi terlihat oleh semua (Arendt, 1963:124).

Setelah manusia akhirnya telah mampu menggunakan pikirannya dengan aktif dan didasari oleh kebebasan, sebagai langkah penyempurnaan tindakannya tersebut maka manusia perlu ruang bersama agar tindakannya tersebut dapat ditujukan demi kehidupan bersama. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, dalam rangka penyingkapan "siapa manusia?" Arendt mengandaikan kondisi dunia dan manusia di dalamnya bersifat plural. Melalui tindakan dan ucapan mereka berusaha menjawab pertanyaan tersebut, dalam pluralitas dunia bersama, manusia akan membutuhkan ruang penampakan untuk dapat menunjukkan ciri khasnya masing-masing.

salah satunya menjadi polopop *e-government* pada masanya. Setiap inovasi-inovasi yang dikeluarkan Winasa menggiring pendapatan daerah Jembrana naik pesat dari tahun-tahun sebelumnya.

Karakter manusia politik yang dapat dilihat dari kedua tokoh politik ini adalah mereka yang bebas secara internal maupun eksternal. Winasa dan Ahok, mampu lepas dari hegemoni nilai masyarakatnya. Ahok yang mengesampingkan sentimen rasial yang diterimanya, dan Winasa selama kepemimpinannya justru dianggap dekat dengan kelompok agama minoritas di Bali.

Selain itu keduanya mendapatkan kekuasaan (*power*) baik secara *de jure* maupun *de facto*. baik Ahok maupun Winasa

mendapatkan kesetiaan dan kepercayaan masyarakatnya untuk membawa kehidupan bersama mereka lebih baik, meskipun ketika mereka telah turun dari jabatannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Arendt, bahwa kekuasaan (power) merupakan hasil dari solidaritas.

4.4. KONSEP DAN PRAKTIK IDEAL RUANG PUBLIK HANNAH ARENDT

Arendt menggambarkan ruang politik publik melalui tiga fitur, yakni: 1) Artifisialitas kehidupan publik, kehidupan publik dan aktivitas politik bersifat artifisial, tidaklah terbentuk secara natural. Politik bagi Arendt tidak sesuai dengan segala keniscayaan, dan bukan “menjadi” karena kenaturalan sebagaimana yang dianut tradisi Aristotelian. Politik bagi Arendt jauh melampaui kenaturalan tersebut yang menjadi kodrati bagi manusia, ia merupakan kreasi dari tindakan dan wacana bebas. 2) Kualitas spasial kehidupan publik, Opini politik tidak bisa terbentuk dalam ruang privat individu, mereka dibentuk, diuji, dan diperluas hanya dalam konteks argumentasi dan debat publik, ia hanya akan terbentuk ketika manusia berkesempatan untuk berkomunikasi dan mengemukakan pandangan mereka dengan orang lain. Maka dari itu ia membutuhkan ruang publik untuk dapat bersua agar opini tersebut tidak tereduksi. 3) Perbedaan antara kehidupan pribadi dan publik, memisahkan eksistensi manusia lewat kehidupannya sebagai seorang pribadi dan kehidupannya sebagai seorang warga dunia yang hidup bersama orang lain karena pada dasarnya kepentingannya individu atau pribadi tidak selalu sejalan dengan kepentingan publik, namun

kepentingan publik sendiri tetap berkaitan dengan kepentingan individu yakni untuk tetap hidup bersama pada dunia tempatnya dilahirkan serta dunia yang akan terus ada bahkan setelahnya mati, dan dalam pengejawantahannya dalam berbagai aktivitas kerap kali berbenturan dengan pemenuhan kebutuhan pribadi yang sifatnya jangka pendek (d'Entreves, 2003: 237-250).

Dalam upayanya mendefinisikan ruang publik, Arendt mengartikulasikannya dalam dua dimensi, hal tersebut merujuk pada ruang penampakan dan dunia bersama. Makna ruang publik sebagai ruang penampakan adalah ruang tempat segalanya dapat menampakan diri, dapat dilihat oleh orang lain, dan bahkan terpublikasikan. Ruang penampakan ini memberikan kesempatan bagi individu untuk menunjukkan “apa yang seharusnya”, menunjukkan pada orang lain sebagaimana kita melihatnya. Ruang penampakan ini menyajikan realitas, ia adalah sekumpulan isi hati, pemikiran, ide yang mengalami proses deprivatisasi, deindividualisasi, dan bertransformasi menjadi suatu bentuk yang sesuai untuk dapat ditampilkan di ruang penampakan (Arendt, 1958: 50).

Makna kedua ruang publik sebagai dunia bersama berkaitan dengan dunia sebagai suatu ruang yang menyatukan warga dunia bersama dengan kehendak kolektifnya untuk tetap hidup bersama. Dunia yang menghubungkan sekaligus memisahkan, ia berada di-antara manusia. Seperti analogi ‘meja’, ia satu-satunya yang menjadi perantara penghubung antara manusia yang duduk mengitarinya, namun juga sekaligus

menjadi pemisah di antara mereka. Dunia bersama ini menyatukan manusia sekaligus mencegahnya untuk menyakiti satu sama lain.

Adanya pemisahan antar individu oleh dunia bersama ini memberikan kesempatan bagi tiap mereka untuk menunjukkan identitasnya dalam suatu tindakan politik. Sifat tindakan yang temporal seiring berkembangnya manusia ini oleh dunia bersama diubah menjadi narasi sehingga dunia akan mendapatkan ukuran imortalitasnya.

Terdapat dua kondisi destruktif yang harus dihindari bagi dunia bersama sebagai ruang publik, dua hal tersebut adalah: pertama, terjadinya isolasi radikal, di mana semua orang tidak dapat saling setuju satu sama lain (Arendt, 1958: 58). Hal ini dapat ditemui pada masyarakat dengan pemerintahan yang tiran. Dalam pemerintahan seperti ini komunikasi antar individu sudah tidak berguna lagi. Pemerintahan tiran melucuti tiga fakultas fundamental manusia (berpikir, tindakan, dan wacana) sehingga ia menjadi “manusia yang sama dengan binatang” (*animal-species man*).

Kedua, dunia bersama dapat runtuh apabila terjadi “masyarakat massa” atau “histeria massa”, di mana semua orang tiba-tiba berperilaku seolah-olah mereka adalah anggota dari satu keluarga, masing-masing melipatkandakan dan memperpanjang perspektif orang-orang di sekitarnya. Mereka semua dipenjarakan dalam subjektivitas dari pengalaman tunggal mereka sendiri, yang tidak berhenti menjadi tunggal jika pengalaman yang sama dikalikan berkali-kali.

Akhir dari dunia bersama telah datang ketika ia hanya dilihat dari satu aspek dan diizinkan untuk menampilkan dirinya hanya dalam satu perspektif (Arendt, 1958: 58).

4.5. KONTEKSTUALISASI RUANG PUBLIK HANNAH ARENDT DI ERA KONTEMPORER

Salah satu forum yang “masuk” sebagai bentukan dari ruang publik Arendt adalah Balai kota Jakarta yang mana pada pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dibuka untuk umum sebagai tempat pengaduan langsung. Arendt sendiri menginginkan adanya ruang spasial bagi aktivitas politik yang memungkinkan warga bertemu secara langsung, selain untuk menghindari anonimitas juga untuk mempertanggungjawabkan bahwa pendapatnya adalah kepentingan publik.

Ruang publik lain yang memanfaatkan aduan sebagai dasar fabrikasinya adalah *simakrama* Gubernur Bali yang dirintis pada masa pemerintahan Mangku Pastika. Sama seperti di Balai kota Jakarta, segala aduan ataupun aspirasi dapat disampaikan oleh seluruh kalangan dalam *simakrama* ini. *Simakrama* membuka ruang bagi mereka yang suaranya tidak terepresentasi dalam wacana publik (Wiranata dan Amanda, tanpa tahun: 4).

Kedua forum diskusi tersebut menggambarkan secara baik ruang publik Arendt lengkap dengan ketiga fiturnya. Namun kedua forum di atas masih belum dapat dikatakan ideal sebagai ruang publik Arendt adalah karena keduanya masih

melibatkan relasi kuasa, kedudukan manusia di dalamnya masih belum egaliter. Salah satu pihak dalam forum tersebut masih dapat membatalkan pendapat dari anggota diskusi lainnya. Terdapat kelompok minoritas berkuasa yang mendominasi kuota wacana publik.

Adapun bentuk kolektif lain yang bagi penulis berpotensi menjadi relevan dengan konsep ruang publik adalah “gang” atau jalan kecil yang menghubungkan satu rumah dengan rumah lain dalam kompleks perumahan. Kehidupan kolektif dalam gang memang terbentuk secara natural pada awalnya, tetapi kesadaran komunal warga yang tinggal di dalamnya terbentuk secara artifisial di mana tercermin pada aktivitas seperti ronda, siskamling, dan gotongroyong. Tidak ada strata sebagai pembeda warga dalam satu gang, mereka hanya ada satu status di dalamnya yakni, ‘tetangga’.

4.6. RELASI MANUSIA POLITIK DAN RUANG PUBLIK

Aktivitas ketiga pada *vita activa* yakni tindakan adalah satu-satunya yang dianggap mampu membentuk ruang publik yang ideal. Tindakan mengandaikan pluralitas manusia karena aktivitasnya ia membutuhkan kehadiran orang lain sebagai legitimasi tindakannya. Tanpa adanya penonton maka tindakan tersebut tidak akan bermakna. Di sinilah peran ruang publik sebagai ruang penampakan untuk memberikan ‘panggung’ bagi manusia untuk menyingkap identitasnya. Jawaban dari “siapa manusia” ini nantinya akan tergantung pada bagaimana penerimaan

pluralitas terhadap tindakan dan wacana seorang individu dan apa tujuan dari aktivitas tersebut.

Penyingkapan identitas manusia ini berarti mengetahui sebagai apa dan bagaimana manusia dalam kehidupannya bersama dengan manusia lain. Ruang publik menjadi sumber pemaknaan dari segala aktivitas manusia apakah ia akan di

golongkan dalam politik atau apolitik.

Ruang publik menemukan keselarasannya dengan tindakan adalah melalui kekuasaan. Bagi Arendt, seseorang dikatakan berkuasa ketika ia mendapat legitimasi, yang artinya ia bertindak atas nama bersama. Jadi singkatnya, kekuasaan adalah “solidaritas politis para warga negara”. Tugas dari kekuasaan ini adalah mengembangkan kebebasan tiap individu tanpa menyelenggarakan dominasi. Refleksi filsafat Arendt mengesampingkan pengalaman buruknya terhadap kekuasaan dan mengangkat tinggi positivisme kekuasaan sebagai manifestasi dari kehidupan bersama manusia (Nugroho, 2009:70).

Sebagai sebuah konsensus, kekuasaan dicapai melalui diskursus yang rasional dan terbuka, di mana individu mengutarakan masing-masing kepentingannya tanpa rekayasa atau maksud lain. Kesesuaian antara tindakan dan ucapan menjadi syarat utama dari diskursus politik ini. Dalam ruang publik sebagai ruang penampakan, kekuasaan dijalankan sebagai “an act in concert” yang legitimasinya adalah konsensus yang telah disepakati (Jena, 2011: 182-183).

5. KESIMPULAN

Penjabaran mengenai manusia politik Hannah Arendt tidak bisa lepas dari inti pemikirannya, yakni keberadaan manusia. Aktivitas manusia bagi Arendt terbagi menjadi dua yakni aktifitas kontemplasi (*vita contemplativa*) yang dilaksanakan di dunia teori atau *bios theoretikos* dan aktivitas aktif (*vita contemplativa*) yang dilaksanakan di dunia praktik atau *bios politikos*. Adapun tiga jenis aktivitas kontemplasi manusia, yakni: 1) Berpikir (*thinking*), 2) Berkehendak (*willing*), dan 3) Menilai (*judging*). Sedangkan *vita activa* sendiri terdiri dari: 1) Kerja (*labour*), 2) Karya (*work*), dan 3) Tindakan (*action*). Dari ketiga jenis aktivitas aktif tersebut, tindakan dianggap sebagai puncak aktivitas tertinggi bagi manusia dan melalui tindakan tersebut manusia nantinya dapat mengungkapkan identitas dirinya sebagai seorang manusia politik.

Konsep ideal manusia politik dapat digambarkan melalui dua karakter. Karakter *pertama*, manusia politik adalah yang aktif menggunakan pikirannya. Memang pada dasarnya semua manusia memiliki kemampuan berpikir, namun tidak semua aktif menggunakan kemampuannya tersebut. Hal inilah yang disebut dengan fenomena keabsenan pikiran. Jadi ia bukannya bodoh, melainkan tidak mampu menggunakan pikirannya untuk keluar dan mengambil jarak dari hegemoni nilai dan menemukan perspektifnya sendiri. Karakter *kedua* ialah manusia yang bebas. Bebas di sini berbeda dengan kebebasan dalam pengertian tradisi liberal yaitu bebas akan berbagai pilihan.

Bebas dalam pengertian Arendt adalah bebas dari tekanan hasrat privat. Ia merangkum arti kebebasan bagi manusia politik tersebut sebagai kebebasan politik atau *freedom to*. Di era sekarang, kontekstualisasi manusia politik dapat ditemui dua tokoh politik Indonesia yakni Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Gede Winasa. Keduanya menggambarkan sifat dan karakter seorang manusia politik ketika mengemban tugasnya sebagai seorang pejabat publik (gubernur dan bupati). Dari penjabaran kedua karakter tersebut juga dapat dilihat bahwa ternyata tidak semua aktor politik dapat digolongkan sebagai seorang manusia politik.

Eksistensi manusia politik baru didapat ketika ia melakukan seluruh tindakan dan wacananya di ruang publik. Di mana ruang publik sebagai ruang penampakan memberikan manusia publik untuk mengafirmasi tindakannya. Karena tanpa adanya publisitas, seluruh tindakan tersebut hanya berkuat pada ruang privatnya saja. Selain itu seluruh tindakan manusia politik baru dapat dikatakan sebagai politis apabila ia melaksanakannya dengan dasar kehendak kolektif untuk kehidupan di dunia bersama. Ruang publik sebagai dunia bersama adalah keseluruhan kondisi yang manusia ciptakan dan harus ia hidupi bersama-sama. Selain sebagai ruang penampakan dan dunia bersama, ruang publik pula berperasn sebagai ruang di mana ia memisahkan sekaligus menyatukan setiap individu yang ada di dalamnya, hal tersebut dinamakan sebagai ruang di antara.

Terdapat dua forum yang memenuhi fitur ruang publik Arendt, yakni Balai Kota

Jakarta dan *simakrama* Gubernur Bali. Keduanya memenuhi tiga fitur ruang publik Arendt seperti artifisialitas kehidupan publik, kuelaitas ruang spasial, dan perbedaan antara kepentingan publik dan kepentingan privat. Namun kedua forum tersebut masih mengandung relasi kuasa di dalamnya sehingga belum sepenuhnya dikatakan penggambaran ruang publik yang ideal bagi Arendt. Adapun bentuk lain yang dapat dikatakan sebagai bentuk kontekstualisasi

ruang publik Arendt adalah kehidupan 'gang'. Di mana selain memenuhi ketiga fitur ruang publik Arendt, 'gang' pula menyimpan kesadaran komunal dari para penghuni di dalamnya untuk mempertahankan kehidupan yang nyaman di dalam 'gang' tersebut.

Dari kedua penjabaran konsep ideal tersebut ditemukan bahwa manusia politik dan ruang publik Arendt memiliki relasi yang sangat kuat di mana mereka membutuhkan satu sama lain untuk dapat mengada di dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku;

Primer:

Arendt, Hannah. 1958 *The Human Condition*. Chicago: University of Chicago Press

_____. 1963. *On Revolution*. Hardmonsworth: Penguin Books

_____. 1978. *The Life of Mind*. Vol.1, *Thinking*. Vol.2. *Willing*. New York: Harcourt Brace Jovanovich

_____. 2012. *Eichmann in Jerusalem: Reportase tentang Banalitas Kejahatan*. Teguh Wahyu Utomo (terj.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sumber Sekunder:

Buku;

D'Entréves, Maurizio Passerin. 2003. *Filsafat Politik Hannah Arendt*. M. Syahwan (terj.) Yogyakarta: CV Qalam.

Jurnal, Skripsi, Tesis;

Indah, Astrid Veranita. 2015. Jatidiri Manusia Berdasarkan Filsafat Tindakan Hannah Arendt Perspektif Filsafat Manusia: Relevansi Dengan Pelanggaran HAM Tahun 1965-1966 Di Indonesia. *Jurnal Filsafat*. 25(2).

Jena, Yeremias. 2009. Kejahatan yang Banal dan Kekerasan oleh Negara Refleksi Hannah Arendt atas Pengadilan Adolf Eichmann di Yerusalem. *Respons*. 14(2).

Harahap, Syahrin. 2011. *Metodologi Studi Tokoh & Penulisan Biografi*. Jakarta: Prenada

Haryatmoko. 2014. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Kompas

Terre, Eddie S. Riyadi Langgut. 2013. *Manusia Politik, Sebuah Rekonstruksi Interpretasi Hannah Arendt terhadap Tindakan Politik Manusia*, dalam Edi Riyadi Terre et al. 2013. *Manusia, Laki-Laki, Perempuan, Pengantar ke Pemikiran Hannah Arendt, Seyla Benhabib, Judith Butler, Ziba Mir-Hosseini*. Jakarta: Komunitas Salihara

Internet;

Wiranata, I Made Anom dan Ni Made Ras Amanda G. Tanpa tahun. *Demokrasi dalam Komunikasi Politik "Simakrama" Pemerintah Provinsi Bali*. Diakses dari: https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/c949187263134401a510c5b4729d7f69.pdf pada 10 Juli 2019

Nugroho, Stanislaus. 2009. Politik, Kekuasaan, dan Kekerasan Perspektif Hannah Arendt. *Respons*. 14(01)

Pandor, Pius. 2013. Menyibak Tabir Politik Otentikarendtlan: Sebuah Pembacaan dari Perspektif Etika Politik. *Jurnal Filsafat Arete*. 2(1).

Wardhani, Paramita. 2014. *Enlarged Thought: Berpikir Politis Menurut Hannah Arendt* [skripsi]. Depok: Universitas Indonesia

Lain-lain;

Terre, Eddie S. Riyadi Langgut. 2011. *Manusia Politis Menurut Hannah Arendt Pertautan antara Tindakan dan Ruang Publik, Kebebasan dan Pluralitas, dan Upaya Memanusiawikan Kekuasaan*. Dipresentasikan pada Kuliah Umum Filsafat Komunitas SALIHARA, 6 April 2011, yang diselenggarakan oleh Komunitas SALIHARA bekerja sama dengan HIVOS, Jakarta.